

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terumbu karang sebagai salah satu ekosistem yang berada di perairan dangkal memiliki produktivitas primer dan keanekaragaman jenis yang tinggi. Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah kawasan segitiga karang dunia menjadikan wilayah ini memiliki jenis karang terbanyak yaitu sekitar 500 jenis dari 70 genus, dimana luas areal terumbu karang mencapai  $\pm 60.000 \text{ km}^2$  (COREMAP, 2009).

Ekosistem terumbu karang memiliki nilai ekologis yang tinggi mengingat wilayah ini dijadikan habitat untuk bertelur (*nesting ground*), berpijah (*spawning ground*), pengasuhan (*nursery ground*), dan mencari makan (*feeding ground*) bagi banyak ikan-ikan dan biota lainnya. Kenyataannya, kondisi terumbu karang Indonesia pada saat ini cukup memprihatinkan dimana kondisi terumbu yang sangat baik hanya tinggal sekitar 5,23%, baik 24,26%, cukup 37,34% dan yang kurang baik atau rusak sebesar 33,7% (COREMAP, 2009). Ancaman terbesar bagi keberadaan terumbu karang datang dari beberapa aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan dan tidak ramah lingkungan, penambangan dan pengerukan, industri, kegiatan wisata yang tidak ramah lingkungan, sedimentasi serta adanya ancaman yang datang dari aktivitas alam.

Provinsi Gorontalo adalah wilayah yang berada di antara Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Kondisi yang demikian membuat provinsi ini memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar, baik sumberdaya dapat pulih

(ikan, terumbu karang, lamun, dan bakau) maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (mineral dan energi) serta jasa kelautan (pariwisata bahari dan perhubungan laut).

Salah satu potensi sumberdaya pesisir yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang. Melalui interpretasi *Citra Landsat* diperoleh luasan terumbu karang di perairan Provinsi Gorontalo sebesar 21.910,96 Ha (Sirait, 2011). Akan tetapi, potensi tersebut belum semuanya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pengelolaan yang tepat dapat menjamin keberadaan terumbu karang di masa depan, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu hal yang mendasari kondisi tersebut adalah karena kurangnya informasi mengenai keberadaan potensi dan kondisi terumbu karang yang ada, sehingga membuat pengelolaan dan pemanfaatan potensi hanya terbatas di beberapa tempat saja. Sebagai contoh, Kabupaten Bone Bolango yang hampir sepanjang pesisirnya terdapat terumbu karang dimana luasan terumbuhnya diperkirakan sekitar 178,95 Ha (Bakosurtanal, *dalam* Sirait, 2011), kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya terbatas pada daerah KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) Olele.

Terumbu karang, selain memiliki nilai ekologis yang tinggi seperti yang dijelaskan sebelumnya, juga memiliki nilai ekonomi dan sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat ataupun pemerintah daerah. Informasi mengenai sumberdaya perairan di suatu wilayah mutlak diperlukan sebagai dasar bagi pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sejauh ini, informasi mengenai potensi sumberdaya pesisir khususnya kondisi terumbu karang di Provinsi Gorontalo masih terbatas pada wilayah wilayah yang berpotensi sebagai kawasan wisata sedangkan untuk wilayah lainnya informasi tersebut masih sangat minim, salah satunya adalah Desa Binalahe.

Desa Binalahe adalah salah satu desa di Provinsi Gorontalo yang berada di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Desa ini sebelumnya menjadi bagian dari Desa Molotabu sebelum dimekarkan Tahun 2007. Kondisi pemerintahan desa yang masih baru ditambah kurangnya kegiatan penelitian, baik itu oleh pemerintah maupun instansi terkait, sehingga belum adanya informasi mengenai kondisi potensi desa khususnya terumbu karang.

Adanya keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Molotabu yang didirikan dari tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak awal tahun 2013, membuat informasi kondisi terumbu karang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan yang tepat. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kondisi Terumbu Karang di Perairan Desa Binalahe, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kurangnya informasi mengenai kondisi terumbu karang di wilayah Kabupaten Bone Bolango, khususnya yang berada di luar Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Olele membuat pengelolaan potensi terumbu karang tidak

dilakukan secara maksimal. Pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang tidak tepat oleh masyarakat sekitar dan juga pengoperasian PLTU Molotabu, dikhawatirkan akan membuat penurunan kualitas terumbu karang. Melihat kondisi yang ada, permasalahan yang dikaji dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Berapa persentase tutupan karang hidup yang ada di perairan Desa Bintalahe?
2. Bagaimana status kondisi terumbu karang di perairan Desa Bintalahe?
3. Bagaimana hubungan antara kondisi tutupan terumbu karang dengan faktor fisika-kimia perairan Desa Bintalahe?

#### **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui persentase tutupan karang hidup yang ada di perairan Desa Bintalahe.
2. Mengetahui status terumbu karang di perairan Desa Bintalahe.
3. Mengetahui hubungan antara kondisi terumbu karang dengan parameter fisika-kimia perairan Desa Bintalahe.

#### **D. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Untuk Pemerintah : dapat digunakan sebagai salah satu data informasi yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang tepat bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo, khususnya untuk pengelolaan terumbu karang di perairan Desa Bintalahe.

2. Untuk masyarakat : memberikan informasi keberadaan terumbu karang di Desa Bintalahe sehingga peranan masyarakat dapat lebih tinggi dalam menjaga kelestarian terumbu karang.
3. Untuk penelitian : dapat digunakan sebagai data awal bagi kegiatan penelitian selanjutnya